



Signifikansi Nilai-Nilai Pancasila pada Sila ke Lima Bagi Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat

Yakob Pai Tiba¹, Yakobus Adi Saingo^{2*}, I Made Suardana³

^{1,2,3}Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Indonesia

Alamat: Jalan Tajoin Tuan, Naimata, Kec. Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85147

*Korespondensi penulis: y.a.s.visi2050@gmail.com

Abstract. *The country of Indonesia is blessed with great natural wealth so that every citizen should be able to enjoy prosperity, but the facts show that there are still many members of society who are detected as still living below the poverty line. The main objective is to review the significance of Pancasila values in the fifth principle for justice and social welfare. The method used in this research is a literature study with a descriptive analytical approach, the results of which reveal that even though Pancasila as the basis of the Indonesian state emphasizes the importance of social justice, the practice of social justice in the field still faces various significant challenges. This research reveals that there is striking inequality in various aspects of people's lives, including access to the economy, education, health and infrastructure. Even though various policies have been implemented, the results often do not meet expectations, resulting in inequality that continues to widen. Therefore, more inclusive and sustainable policy reforms are needed to overcome social injustice. Some concrete steps that can be taken include fair economic redistribution, increasing access to education and health services, and equitable infrastructure development. All of these efforts must be carried out by involving community participation to ensure that the policies implemented truly reflect the needs and aspirations of all levels of society.*

Keywords: *Community Welfare, Pancasila, Social Justice.*

Abstrak. Negara Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang besar sehingga selayaknya setiap warga dapat menikmati kesejahteraan, namun fakta menunjukkan masih banyaknya anggota masyarakat yang terdeteksi masih hidup di bawah garis kemiskinan. Tujuan utama adalah untuk meninjau tentang signifikansi nilai-nilai pancasila pada sila ke lima bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif analitis yang hasil kajiannya mengungkapkan bahwa meskipun Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menekankan pentingnya keadilan sosial, praktik keadilan sosial di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat ketidakadilan yang mencolok dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, hasilnya sering kali tidak memenuhi harapan, sehingga mengakibatkan ketimpangan yang terus meluas. Oleh karena itu diperlukan reformasi kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk mengatasi ketidakadilan sosial. Beberapa langkah konkret yang dapat diambil meliputi redistribusi ekonomi yang adil, peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang merata. Semua upaya ini harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat.

Kata kunci: Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat, Pancasila.

1. LATAR BELAKANG

Keadilan sosial merupakan elemen fundamental dalam pembangunan suatu negara yang inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan meraih kesejahteraan (Siregar, 2014). Sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," mencerminkan cita-cita bangsa Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan yang merata di setiap lapisan masyarakat. Namun, pada

kenyataannya, ketidakadilan sosial masih sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Ketimpangan akses, ketidaksetaraan pendapatan, dan diskriminasi adalah beberapa contoh permasalahan yang menghambat pencapaian keadilan sosial di Indonesia (Syahriar et al., 2024).

Meskipun Indonesia memiliki fondasi ideologis yang kuat dalam Pancasila, ketidakadilan masih sering terjadi di berbagai sektor kehidupan (Pelita et al., 2024). Banyak upaya yang telah dilakukan, seperti penerapan program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, efektivitas dari upaya-upaya tersebut perlu ditinjau ulang dan dievaluasi agar prinsip keadilan sosial benar-benar dapat diimplementasikan secara optimal di tengah masyarakat.

Keadilan sosial dalam kerangka sila kelima Pancasila, menyoroti berbagai aspek, meliputi: aspek-aspek makro ekonomi dan distribusi pendapatan, pendidikan yang layak, kemudahan akses jaminan kesehatan, namun belum cukup menyoroti aspek implementasi nilai Pancasila dalam membangun keadilan sosial di berbagai sektor kehidupan sehari-hari (Taqiyuddin et al., 2022). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan atau "blind spot" dalam penelitian yang telah ada, terutama dalam konteks pengaplikasian Pancasila sebagai landasan ideologis yang mendorong terciptanya keadilan sosial secara praktis. Kesenjangan ini menjadi alasan utama mengapa penelitian ini diperlukan untuk memperluas pemahaman mengenai bagaimana nilai-nilai sila kelima Pancasila dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata, dan bukan hanya sebatas konsep ideologis.

Kebaruan atau novelty dalam penelitian ini adalah pengusulan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan teori keadilan sosial dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang merata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru terhadap kajian keadilan sosial dengan memberikan penekanan pada nilai-nilai ideologis Pancasila sebagai landasan dalam menyusun kebijakan publik yang berpihak pada rakyat, sehingga dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dalam memahami peran penting sila kelima Pancasila dan bagaimana prinsip-prinsip keadilan sosial dapat diintegrasikan dalam berbagai sektor kebijakan publik.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini perlu mengemukakan berbagai karya ilmiah terdahulu yang relevan dengan kajian yang dilakukan ini, sehingga dapat dilakukan pengembangan penelitian selanjutnya. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan ini, antara lain:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh (Juliana et al., 2023) berjudul “Implementasi Sila Ke 5 Pancasila Bagi Kesejahteraan Masyarakat”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa, temuan menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah selama pandemi Covid-19 memiliki keterkaitan negatif dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Jelas dari koefisien korelasi dan koefisien nilai determinasi bahwa distribusi bantuan sosial selama pandemi tidak banyak meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan individu hanya dipengaruhi oleh kasus kesejahteraan sejauh 0,04%. Sedangkan faktor lainnya bertanggung jawab atas 99,96% sisanya. Sumber tersebut mengklaim bahwa salah satu alasan bantuan sosial memiliki dampak kecil pada kesejahteraan masyarakat adalah bahwa masih banyak contoh penyalahgunaan bantuan dan sistem distribusi bantuan dapat menggunakan banyak pekerjaan. Dengan cara ini, mempromosikan kesejahteraan umum membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat luas. untuk mencegah masyarakat dirugikan oleh pemerintah yang menyebabkan orang menderita.
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh (Siregar, 2014) berjudul “Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa, maraknya separatisme yang mengemuka bersama munculnya kelompok separatis dengan segudang cita-cita idealistik-komunal untuk menciptakan kehidupan yang lebih demokratis dan lebih berkeadilan akhir- akhir ini terasa cukup memprihatinkan. Hal ini terjadi di tengah-tengah upaya berbagai pihak, pemerintah dan non-pemerintah untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan Indonesia.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai sila kelima Pancasila merupakan sebuah kajian umum, serta memiliki relevansi dengan kajian yang dilakukan dalam penelitian ini. Namun yang menjadi membeda yaitu penelitian ini terfokus pada keadilan dari pembuat kebijakan, yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, secara luas.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengeksplorasi penerapan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam konteks masyarakat modern. Pola deskriptif analitis dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan memahami fenomena ketidakadilan sosial yang kompleks dan beragam dalam masyarakat, kemudian menganalisisnya secara sistematis untuk mendapatkan solusi yang aplikatif. Pendekatan deskriptif analitis dalam

penelitian kepustakaan akan membantu peneliti untuk memaparkan secara rinci pokok permasalahan yang hendak didalami berbasis literatur ilmiah (Taqiyuddin et al., 2022). Proses penelitian dimulai dengan tahap pengumpulan data sekunder melalui studi literatur dari berbagai sumber, termasuk buku-buku yang berfokus pada teori keadilan sosial dan nilai-nilai Pancasila, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen pemerintah. Analisis data diimplementasikan secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola-pola ketidakadilan yang umum terjadi di masyarakat serta menganalisis signifikansi nilai-nilai pancasila pada sila ke lima bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang ketimpangan sosial di Indonesia yang terjadi di berbagai sektor utama, seperti: bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perumahan. Walaupun berbagai kebijakan telah diupayakan oleh pemerintah untuk mengatasi ketidakadilan ini, data menunjukkan bahwa tantangan dalam implementasi keadilan sosial masih ada di berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam sila kelima Pancasila, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan menyeluruh. Berikut ini hasil dan pembahasan mengenai signifikansi nilai-nilai pancasila pada sila ke lima bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Kaitan Antara Keadilan dan Kesejahteraan

1) Ketimpangan Ekonomi

Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah adanya ketimpangan ekonomi yang signifikan antara kelompok masyarakat dengan pendapatan tinggi dan mereka yang berpenghasilan rendah. Data menunjukkan bahwa lebih dari 20% dari total pendapatan nasional dikuasai oleh 1% kelompok masyarakat berpendapatan tertinggi, sementara mayoritas penduduk masih hidup dengan tingkat pendapatan yang jauh lebih rendah (Arifianto & Setiyono, 2011). Ketimpangan sosial di tengah masyarakat ini terjadi terutama di wilayah perkotaan besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan.

Ketimpangan ekonomi juga terlihat dari data yang menunjukkan perbedaan besar dalam standar hidup antara pekerja di sektor formal dan sektor informal. Pekerja informal seperti tukang ojek, pedagang kaki lima, dan buruh harian sering kali mendapatkan penghasilan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, tidak memiliki akses terhadap jaminan sosial atau kesehatan yang memadai,

yang memperburuk kondisi mereka ketika menghadapi situasi darurat, seperti sakit atau pandemi. Dalam konteks masyarakat modern, kasus ketimpangan ekonomi semakin jelas terlihat pada ketidakseimbangan kekayaan di antara kelas sosial. Misalnya, pada sektor properti di perkotaan, kelompok berpenghasilan tinggi dapat membeli properti dan menjalankan bisnis properti, sementara kelompok berpenghasilan rendah harus menghadapi biaya sewa yang tinggi tanpa peluang untuk memiliki properti sendiri. Hal ini memperbesar jurang ketimpangan sosial di Indonesia, di mana kebijakan redistribusi pendapatan yang lebih efektif sangat dibutuhkan (Arifianto & Setiyono, 2011).

2) Ketidakmerataan dalam Akses Pendidikan

Pendidikan adalah elemen penting dalam pembentukan masyarakat yang adil dan makmur. Namun fenomena menunjukkan bahwa ketidakmerataan akses pendidikan masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Anak-anak di wilayah perkotaan cenderung mendapatkan pendidikan berkualitas lebih baik daripada anak-anak di pedesaan, yang sering kali mengalami keterbatasan fasilitas dan tenaga pengajar (Maula et al., 2023).

Sebagai contoh, di beberapa wilayah di Papua dan Nusa Tenggara Timur, akses ke fasilitas pendidikan sangat terbatas. Banyak sekolah di daerah ini tidak memiliki perpustakaan, akses internet. Sementara itu, di perkotaan, siswa dapat memanfaatkan berbagai fasilitas pendidikan, mulai dari perpustakaan yang lengkap hingga akses internet cepat yang dapat menunjang pembelajaran digital. Akibatnya, siswa di daerah terpencil kurang mendapatkan kesempatan yang setara dalam meningkatkan keterampilan dan kemampuan akademik mereka. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada prestasi akademik tetapi juga menghambat mobilitas sosial. Siswa dari latar belakang yang kurang beruntung memiliki akses yang terbatas terhadap peluang kerja yang lebih baik, sehingga melanggengkan ketimpangan generasi demi generasi (Nasrul et al., 2024).

3) Akses fasilitas pendidikan di perkotaan dan pedesaan

a) Fasilitas perpustakaan

Dalam pelaksanaannya perguruan tinggi dilengkapi dengan fasilitas dan sarana yang mendukung keberhasilan perguruan tinggi tersebut yaitu dengan penyediaan perpustakaan. Dengan adanya perpustakaan tersebut akan sangat membantu penyebaran informasi dan juga untuk membantu kelancaran proses belajar mandiri. Disamping itu perpustakaan merupakan tempat sumber pengumpulan data untuk menunjang proses pendidikan, penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat. Sesuai dengan fungsinya perpustakaan perguruan tinggi dituntut untuk memberikan pelayanan dan fasilitas yang berkualitas agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna perpustakaan. Perpustakaan sebagai lembaga penyedia jasa diharapkan dapat memenuhi kepuasan penggunaannya dengan penyediaan berbagai informasi, sumber informasi dan memberikan pelayanan yang berkualitas serta kelengkapan fasilitas. Penelitian yang berkaitan dengan kualitas pelayanan dan kepuasan yang dilakukan oleh (Nasrul et al., 2024) menyebutkan bahwa fasilitas pendukung dengan bentuk fasilitas fisik organisasi yang digunakan sebagai alat komunikasi pelayanan terhadap konsumen. Dan elemen dari desain fasilitas pelayanan meliputi elemen fisik seperti layout, penggunaan teknologi sebagai sarana dalam pemberian jasa, dan dekorasi yang ada pada perpustakaan.

b) Akses dan Pemanfaatan Internet

Keadilan sosial juga meliputi kemudahan akses internet ke seluruh Indonesia. Menurut (Susanto, 2017) Keterjangkauan akses internet bagi masyarakat desa menjadi bagian dari pemenuhan hak dasar berkomunikasi bagi masyarakat dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin kemerataannya. UU No. 36 tahun 2009 tentang Telekomunikasi mewujudkan upaya tersebut melalui bentuk Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) atau secara internasional dikenal dengan istilah Universal Service Obligation (USO). Implementasi program KPU ini, dalam laporan tahunan Kementerian disebutkan bahwa sampai dengan Desember 2013, disebutkan telah dibangun sebanyak 32. 208 SSL (Satuan Sambungan Langsung) untuk desa di wilayah non komersial yang dilayani akses telekomunikasi dari sejumlah target 33. 184 desa. Juga telah dibangun sebanyak 1. 857 Mobile-Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK), sebanyak 5. 956 Pembangunan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan sebanyak 1. 222 PLIK di pusat-pusat atau sentra produktif. Masih terkait percepatan pembangunan akses internet di pelosok tanah air, telah dibangun juga National Internet Exchange di 33 provinsi, kemudian International Internet Exchange di 4 provinsi, pembangunan 533 PoP sebagai wujud penyediaan jasa akses publik layanan internet WIFI Kabupaten serta pembangunan 287 BTS sebagai wujud penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika di daerah perbatasan dan pulau terluar.

Maka dari itu, faktor kondisi dan kebutuhan masyarakat perlu dilihat terlebih dahulu sebagai objek atau tujuan kebijakan. Faktor tersebut minimal meliputi: kesiapan masyarakat (dalam hal ini e-readines) dan kebutuhan terhadap

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh masyarakat. Hasil survei menunjukkan salah satu fakta bahwa desa-desa di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) telah berdering dengan masuknya dan berkembang pesatnya operator seluler, sehingga sebagian besar masyarakat di wilayah WPUT telah memiliki HP pribadi bahkan per KK dapat dikatakan 100%². Hal inilah yang menjadikan akses telepon umum dalam program Desa Dering menjadi tidak optimal pemanfaatannya. Dari berbagai kendala tersebut,

4) Ketidakadilan dalam Akses Layanan Kesehatan

Akses yang tidak merata terhadap layanan kesehatan merupakan salah satu bentuk ketidakadilan sosial yang serius. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat di daerah terpencil, terutama di wilayah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, sering kali mengalami keterbatasan dalam memperoleh layanan kesehatan dasar. Ketiadaan ataupun ketidaklengkapan fasilitas kesehatan dan terbatasnya jumlah tenaga medis di daerah-daerah ini memperparah situasi (Susanto, 2017). Contoh nyata dari ketidakadilan dalam akses layanan kesehatan terlihat di beberapa desa di Papua, di mana masyarakat harus berjalan kaki selama berjam-jam untuk mencapai pusat kesehatan terdekat. Selain itu, pasien yang membutuhkan penanganan medis lanjutan sering kali harus dirujuk ke rumah sakit besar di kota lain, yang membutuhkan biaya transportasi yang mahal. Walaupun pemerintah telah mengimplementasikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), akses dan distribusi layanan ini masih terbatas di banyak daerah terpencil (Notonegoro, 2014).

5) Ketidakmerataan Infrastruktur di Wilayah Terpencil

Pembangunan infrastruktur yang merata sangat penting untuk menciptakan akses ekonomi dan sosial yang setara. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak daerah di Indonesia yang belum terjangkau oleh infrastruktur dasar, seperti listrik, jalan yang layak, dan akses air bersih (Susanto, 2017). Sebagai contoh, di beberapa desa di Kabupaten Mentawai, Sumatra Barat, masyarakat harus bergantung pada sumber energi yang terbatas karena jaringan listrik tidak menjangkau wilayah mereka. Ketiadaan listrik membatasi berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari aktivitas ekonomi hingga kesempatan pendidikan bagi anak-anak. Di daerah lain seperti Kalimantan dan Papua, medan geografis yang sulit juga menjadi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur, yang pada akhirnya menghambat mobilitas dan mengisolasi daerah-daerah ini dari perkembangan ekonomi nasional.

6) Ketidakadilan dalam Akses Perumahan

Di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, harga properti yang tinggi membuat banyak masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan untuk memiliki rumah yang layak. Akibatnya, banyak dari mereka tinggal di kawasan kumuh atau daerah padat penduduk yang tidak memiliki akses sanitasi yang memadai. Situasi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ketidakadilan dalam hal akses terhadap hunian yang layak di Indonesia. Ketidakmerataan akses perumahan ini juga memperburuk kualitas hidup masyarakat karena mereka harus tinggal di lingkungan yang tidak sehat dan jauh dari fasilitas umum seperti rumah sakit atau sekolah. Sebaliknya, kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dapat membeli hunian yang dilengkapi fasilitas lengkap di kawasan elit. Ketimpangan dalam akses perumahan ini menjadi salah satu tantangan besar dalam mewujudkan keadilan sosial di sektor perumahan (Susanto, 2017).

7) Pembahasan dan Implikasi Terhadap Penerapan Keadilan Sosial Pancasila

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pemerintah untuk mengurangi ketidakadilan, masih banyak hambatan dalam pelaksanaan keadilan sosial di Indonesia. Ketidakmerataan akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perumahan menciptakan tantangan besar dalam upaya mewujudkan sila kelima Pancasila. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang lebih konkret dalam memastikan bahwa pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara merata. Beberapa rekomendasi yang dapat diambil dari hasil penelitian ini antara lain:

- a) Redistribusi Ekonomi-Melalui kebijakan pajak yang adil dan alokasi subsidi, pemerintah dapat mengurangi jurang ketimpangan ekonomi antara golongan kaya dan miskin.
- b) Peningkatan Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan-Pembangunan sekolah dan pusat kesehatan di daerah terpencil menjadi prioritas utama agar setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap kebutuhan dasar.
- c) Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan-Infrastruktur seperti listrik dan akses jalan yang layak harus diperluas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil.
- d) Perumahan Terjangkau-Penyediaan perumahan terjangkau di perkotaan melalui program perumahan sosial dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan hunian yang layak. Implementasi kebijakan tersebut

diharapkan dapat meminimalkan ketidakadilan sosial yang ada, sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan nilai-nilai Pancasila secara nyata.

Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Dalam Perspektif Pancasila Sila Kelima

Perspektif Pancasila, khususnya pada Sila Kelima menghendaki seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati keadilan sosial dan kesejahteraan taraf hidup. Memang secara kepustakaan dapat diketahui bahwa ketidakadilan sosial di Indonesia masih sangat nyata, meskipun terdapat landasan ideologis yang kuat dalam Pancasila, khususnya sila kelima yang menekankan "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Ketidakmerataan dalam akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perumahan menjadi isu sentral yang harus diatasi untuk mewujudkan keadilan sosial yang hakiki. Dalam konteks ini, penting untuk menafsirkan data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan pandangan para penulis terdahulu, sambil memberikan orisinalitas pemikiran yang berbeda.

Perspektif Pancasila mengungkapkan bahwa fenomena di tengah masyarakat tentang ketidakadilan sosial yang berdampak pada lambatnya peningkatan kesejahteraan rakyat perlu diatasi dengan penguatan pendidikan Pancasila sebagai basis untuk mengatasi ketidakadilan yang sering kali terjadi. Kondisi minimnya keadilan dan lambatnya peningkatan kesejahteraan rakyat tentu menyebabkan bermunculannya pandangan bahwa pemerintah belum secara menyeluruh memperhatikan kesejahteraan rakyat secara merata. Pendidikan yang berbasis Pancasila harus menjadi landasan dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya keadilan sosial.

Pemerintah telah berupaya mensejahterakan rakyat dengan berbagai pendekatan, di antaranya melalui berbagai bentuk bantuan sosial. Namun pentingnya program bantuan sosial dalam memberdayakan masyarakat juga perlu ditinjau. Program bantuan sosial yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat meskipun memiliki tujuan yang baik, tidak selalu efektif dalam mengatasi akar masalah ketidakadilan sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan (Susanto, 2017), yang menyatakan bahwa ketidakadilan sosial tidak hanya terjadi karena faktor ekonomi, tetapi juga karena faktor struktural yang mendalam. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan untuk mengatasi masalah ketimpangan sosial, seperti pendekatan redistribusi ekonomi yang produktif dan peningkatan akses pendidikan yang lebih adil.

Fakta Ketidakadilan Sosial Yang Berdampak Pada Lambatnya Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Data Pustaka menunjukkan adanya berbagai bentuk fenomena keadilan dan kesejahteraan yang kurang merata di tengah masyarakat Indonesia, antara lain:

1) Ketidakadilan dalam Akses Pendidikan

Ketidakadilan dalam akses pendidikan di Indonesia merupakan salah satu temuan penting dalam penelitian ini. Sebagaimana dinyatakan oleh (Sasmiharti, 2023), pendidikan yang tidak merata berkontribusi pada kesenjangan sosial yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Sasmiharti, 2023) yang menunjukkan bahwa siswa di daerah perkotaan mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan mereka di daerah terpencil. Sebagai contoh, di Papua dan Nusa Tenggara Timur, banyak sekolah yang tidak memiliki fasilitas dasar seperti perpustakaan dan laboratorium.

Namun, terdapat perbedaan pandangan mengenai bagaimana mengatasi masalah ini. Sementara beberapa penulis, seperti (Sasmiharti, 2023), berargumen bahwa peningkatan investasi dalam pendidikan di daerah terpencil adalah solusi yang tepat, karena pendekatan yang lebih berkelanjutan harus diambil, yaitu dengan melibatkan masyarakat lokal dalam proses pendidikan. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab di antara masyarakat untuk meningkatkan pendidikan di daerah mereka.

Dalam penelitian ini, penulis berpendapat bahwa kedua pendekatan tersebut perlu diterapkan secara bersamaan. Investasi dalam pendidikan harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat lokal, agar program yang dilaksanakan lebih relevan dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan keadilan sosial di Indonesia.

2) Ketidakadilan dalam Akses Kesehatan

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa akses terhadap layanan kesehatan di Indonesia sangat tidak merata. Menurut (Sasmiharti, 2023), ketidakadilan dalam layanan kesehatan dapat menyebabkan dampak yang serius bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, data menunjukkan bahwa masyarakat di daerah terpencil sering kali kesulitan dalam mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang memadai. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik mereka tetapi juga berkontribusi pada kemiskinan dan ketidakberdayaan sosial.

Persoalan sosialnya perlu adanya peran pemerintah untuk memastikan bahwa layanan kesehatan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, terdapat perdebatan mengenai apakah pendekatan pemerintah saat ini, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sudah cukup efektif dalam mengatasi ketidakadilan ini. Beberapa penulis, seperti Wahyudi (2018), berargumen bahwa meskipun JKN merupakan langkah yang baik, masih terdapat banyak kendala dalam implementasinya, terutama di daerah terpencil.

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa perlu ada evaluasi yang lebih mendalam terhadap program JKN dan kebijakan kesehatan lainnya. Selain itu, pendekatan berbasis masyarakat perlu diterapkan, di mana masyarakat terlibat dalam pengelolaan layanan kesehatan di daerah mereka. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan dapat tercipta layanan kesehatan yang lebih relevan dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

3) Ketimpangan Ekonomi dan Keadilan Sosial

Ketimpangan ekonomi merupakan isu utama yang perlu diatasi untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa lebih dari 20% dari total pendapatan nasional dikuasai oleh 1% kelompok masyarakat berpendapatan tertinggi. Hal ini sejalan dengan temuan (Supriawan, 2024) yang menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan adalah salah satu akar permasalahan ketidakadilan sosial. Sementara itu, (Sasmiharti, 2023) menekankan perlunya redistribusi kekayaan yang lebih adil sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan ini.

Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai bagaimana redistribusi tersebut seharusnya dilakukan. Redistribusi melalui kebijakan pajak yang progresif dapat menjadi langkah yang efektif, oleh karena itu bahwa program-program sosial yang terfokus pada pemberdayaan masyarakat harus menjadi fokus utama. Dalam konteks ini, penulis berpendapat bahwa kedua pendekatan harus saling melengkapi. Kebijakan pajak yang progresif perlu diimplementasikan bersamaan dengan program pemberdayaan yang mengedepankan partisipasi masyarakat.

Implikasi Terhadap Penerapan Keadilan Sosial Pancasila

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat landasan ideologis yang kuat dalam Pancasila, pelaksanaan nilai-nilai keadilan sosial masih menghadapi banyak tantangan. Untuk mencapai keadilan sosial yang hakiki, pemerintah

perlu mengambil langkah-langkah yang lebih konkret dan terarah. Beberapa rekomendasi yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah:

- 1) **Redistribusi Ekonomi:** Melalui kebijakan pajak yang adil dan alokasi subsidi, pemerintah dapat mengurangi jurang ketimpangan ekonomi antara golongan kaya dan miskin. Hal ini perlu dilakukan dengan pendekatan yang transparan dan akuntabel agar masyarakat dapat melihat dampaknya secara langsung.
- 2) **Peningkatan Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan:** Pembangunan sekolah dan pusat kesehatan di daerah terpencil menjadi prioritas utama. Pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat untuk memastikan bahwa fasilitas yang dibangun sesuai dengan kebutuhan lokal.
- 3) **Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan:** Infrastruktur seperti listrik dan akses jalan yang layak harus diperluas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil. Pendekatan berbasis komunitas perlu diterapkan dalam pembangunan infrastruktur agar dapat berkelanjutan.
- 4) **Perumahan Terjangkau:** Penyediaan perumahan terjangkau di perkotaan melalui program perumahan sosial dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan hunian yang layak. Kebijakan ini harus memperhatikan keberlanjutan dan lingkungan.

Dengan melaksanakan rekomendasi ini, diharapkan seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan nilai-nilai Pancasila secara nyata dan mewujudkan keadilan sosial yang diamanatkan dalam sila kelima Pancasila

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menekankan pentingnya keadilan sosial, praktik keadilan sosial di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat ketidakadilan yang mencolok dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, hasilnya sering kali tidak memenuhi harapan, sehingga mengakibatkan ketimpangan yang terus meluas.

Kesimpulan ini menegaskan pentingnya perlunya reformasi kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk mengatasi ketidakadilan sosial. Beberapa langkah konkret yang dapat diambil meliputi redistribusi ekonomi yang adil, peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang merata. Semua upaya ini harus

dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Arifianto, W., & Setiyono, I. (2011). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan di Indonesia. *JUPE: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 3(2), 1–16.
- Juliana, B., Putri, E. R., & Karunia, N. (2023). Implementasi sila ke-5 Pancasila bagi kesejahteraan masyarakat. *Indigenous Knowledge*, 2(4), 290–298.
- Maula, I., Leonardo Sari, A., Sisfiani Sarimin, D., Rondonuwu, S., Al-Hikmah, S., Dua, B., Sirampog, K., Brebes, K., Tengah, J., Sunan Gunung Djati Bandung, U., Nasution, J. A., Bandung, K., Barat, J., Kesehatan, K., & Mongisidi, W. (2023). Pendidikan untuk pemerataan pembangunan: Memperjuangkan hak semua anak. *Journal on Education*, 5(4), 13153–13165.
- Nasrul, M., Setiawan, A., & Hamin, D. I. (2024). Perbandingan sistem ekonomi sosialisme, kapitalisme, dan ekonomi syariah: Sebuah analisis kritis terhadap prinsip, implementasi, dan dampak sosial. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 7(2), 1011–1024.
- Pelita, C., Pendidikan, J., Kebudayaan, D. A. N., Zhafira, A., & Jengka, R. A. (2024). Pancasila sebagai sumber inspirasi pemikiran bangsa: Refleksi dan implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Cahaya Pelita: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 1(1), 6–11.
- Sasmiharti, J. (2023). Manfaat sosial ekonomi dari pendidikan gratis di masyarakat. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 6(1), 57–62. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/16954>
- Siregar, C. (2014). Pancasila, keadilan sosial, dan persatuan Indonesia. *Humaniora*, 5(1), 107–112. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i1.2988>
- Supriawan, E. (2024). Strategi mengatasi ketimpangan pendapatan di masyarakat. *Circle Archive*, 1(5), 1–13.
- Susanto, A. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penggunaan internet masyarakat Desa Pasar VI Kualanamu, Deli Serdang Sumatera Utara. *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika*, 5(1), 65–86. <https://doi.org/10.17933/jppi.2015.0501005>
- Syahriar, I., Bazarah, J., & Khairunnisah, K. (2024). Keadilan sosial di dalam negara hukum Indonesia. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 1(2), 28–38. <https://doi.org/10.59613/wqx8hn76>
- Taqiyuddin, A. M., Misbahuddin, & Kurniati. (2022). Menyoal keadilan sosial terhadap Jemaat Ahmadiyah di Indonesia perspektif Islam dan sila ke-5 Pancasila. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 16(2), 271–293. <https://doi.org/10.24239/blc.v16i2.1321>